



**INSPEKTORAT PROVINSI
LAMPUNG**



RENCANA AKSI TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja tahun 2023 pada unit kerja Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG' at the top and 'INSPEKTORAT' at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the word 'INSPEKTORAT' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
INSPEKTUR,
Ir. FREDY.SM.M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah disusun Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh OPD baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota diwajibkan menyusun Rencana Aksi atas Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2023 yang telah dijabarkan dalam DPA Murni tahun 2023, Inspektorat Provinsi Lampung Pada tahun 2023 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 44.484.304.468,95 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah) Dengan rincian : Belanja Operasi Rp. 40.745.645.000,00 dan Belanja Modal 474.354.000,00. Dengan Belanja tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan **3 Program , 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan** yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi senilai 36.603.490.468,95 Program Penyelenggaraan Pengawasan 6.366.415.000 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1.042.162.000.00 . Melalui dokumen Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini, nantinya akan disajikan rencana atau jadwal kegiatan dalam 1 tahun anggaran dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Bandar Lampung, Oktober 2022

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Dasar Hukum.....	2
	C. Maksud dan Tujuan.....	2
	D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II	GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN.....	4
	A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	4
	B. Sumberdaya.....	6
	C. Sarana Pendukung.....	7
	D. Kinerja Pelayanan.....	7
BAB III	RENCANA AKSI TAHUN 2022.....	11
	A. Visi dan Misi.....	11
	B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	12
	C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022.....	14
BAB IV	PENUTUP.....	19
LAMPIRAN RENCANA AKSI.....		20

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik dipusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari KKN.

Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB. II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung menjelaskan bahwa rincian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat :

- Pasal 156 :
 - Ayat (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - ayat (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Pasal 157 :
 - ayat (1) Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Fungsi

Sesuai dengan Pasal (3) ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Analisa dan Evaluasi;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - Inspektur Pembantu Wilayah V

- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya;

B. Sumberdaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dalam bidang kompetensi/ kualitas SDM.

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia

PEGAWAI	PENDIDIKAN	GOLONGAN	STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 157	S3 : -	IV/d : 1	Ess IV = 3	Auditor : 63
PTHL : 2	S2 : 73	IV/c : 15	Ess III = 6	P2UPD : 50
	S1 : 65	IV/b : 20	Ess II = 1	PBJ : 2
	D4 : 5	IV/a : 20		Perencana : 3
	D3 : 1	III/d : 46		
	D2 : 2	III/c : 28		
	D1 : 1	III/b : 14		
	SLTA : 14	III/a : 4		
	SLTP : -	II/d : 1		
	SD : 1	II/c : 1		
		II/b : -		
		II/a : 7		
		I/d :		
		I/c :		
		I/b :		
		I/a :		

C. Sarana Pendukung

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN*
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Alat-alat angkutan	14	12	2	Lengkap
2.	Alat kantor dan rumah tangga	503	400	103	Lengkap
3.	Alat studio dan alat komunikasi	5	5	-	Lengkap
4.	Bangunan gedung	11	11	-	Lengkap
5.	Bangunan air/ Irigasi	1	1	-	Lengkap
6.	Instalasi	2	2	-	Lengkap
7.	Buku dan perpustakaan	174	174	-	Lengkap

D. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 diperoleh data tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2022 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 420 rekomendasi dari total 426 rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan atau sebesar 98,59%, sedangkan tindak lanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala terhadap kabupaten/kota Tahun 2022 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 827 rekomendasi dari total 850 rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan atau sebesar 97,29%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai Desember Tahun 2022 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 1237 atau sebesar 96,94%.

Tabel 2.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	Dalam Proses	TL Selesai	Persentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2022	426	16	410	96,24%
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2022	850	23	827	97,29%
Jumlah		1276	39	1237	96,94%

Dari uraian data pada tabel 2.3 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah 96,947%.

Pada tahun 2021 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 34 (tiga puluh

empat) kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2021	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Irbn wil V	34	34	100 %
Jumlah		34	34	100 %

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2021 pada 47 (dua puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh rata-rata indeks sebesar 2,96.

Tabel 2.5 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2022

No.	Periode Pemeriksaan	Jumlah OPD	Indeks
1	Januari s/d Desember Tahun 2021	48	3,192

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.6 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022
1.	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	97,72 %
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3,192

BAB. III RENCANA AKSI TAHUN 2022

A. VISI DAN MISI

Provinsi Lampung pada bulan Juni 2019 telah melalui tahapan pergantian Kepala Daerah (KDH) terpilih untuk periode 2019-2024, untuk itu BAPPEDA pun telah menyusun Renstra yang tersinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu :



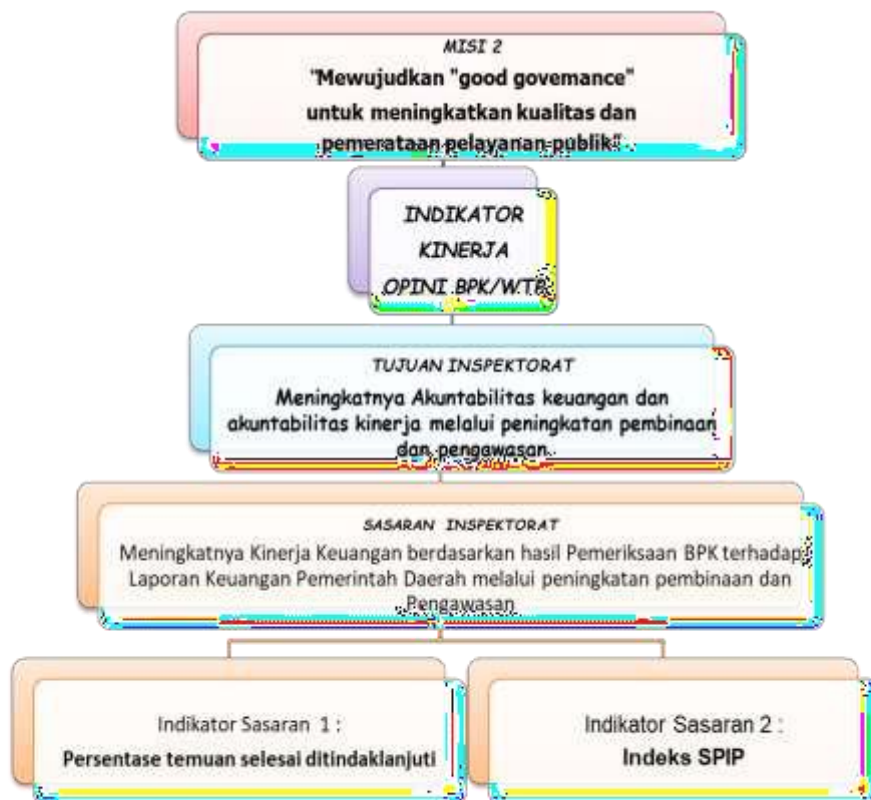
Untuk mencapai visinya, Pemerintah Provinsi Lampung mengemban **misi** yang diharapkan mendorong Provinsi Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Adapun keenam misi tersebut sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
- 2) Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- 3) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
- 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
- 6) Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Inspektorat sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung berperan untuk mewujudkan Misi ke-2 (dua) Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

B. TUJUAN DAN SASARAN dan INDIKATOR KINERJA.

Mengacu pada Visi Misi dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, INSPEKTORAT Provinsi Lampung sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu “**Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik**” dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja” Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai periode 2019- 2024 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”



Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan hasil pembahasan **review terhadap Cascading Indikator kinerja Utama**, terjadi perubahan indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	SATUAN	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	1	1	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	Persen	80%	82%	84%	86%	88%
				2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	LEVEL (SKOR)	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)

C. RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 INSPEKTORAT Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. **44.484.304.468,95**, (Empat puluh empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan koma sembilan lima Rupiah) Dengan rincian :

No.	Uraian Belanja	Rancangan Pagu (Rp)
1.	Belanja Operasi	44.012.067.468,95
2.	Belanja Modal	472.237.000
3.	Belanja Tidak Terduga	0
4.	Belanja Transfer	0
JUMLAH		44.484.304.468,95

INSPEKTORAT Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program , 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi senilai 36.603.490.468,95 Program Penyelenggaraan Pengawasan 6.366.415.000 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1.042.162.000.

Rincian Program , kegiatan dan subkegiatan diantaranya :

I. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Terdiri dari :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan rincian sub kegiatan :
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - o Menyusun program kerja dan rencana kerja
 - o Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja OPD Provinsi dan Kabupaten kota.
 - o Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - o Menyusun program kerja dan rencana kerja
 - o Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan reuiu Dokumen penganggaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - o Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
 - 3) Reuiu Laporan Kinerja.
 - o Menyusun program kerja dan rencana kerja

- Melaksanakan reuiu Dokumen LPPD, Reuiu RPJMD dan LKJ Provinsi.
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
 - 4) Reuiu Laporan Keuangan
 - Menyusun program kerja dan rencana kerja
 - Melaksanakan reuiu LKPD, RKPD dan RKPD Perubahan Provinsi Lampung.
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan.
 - 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota
 - Menyusun program kerja dan rencana kerja
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
 - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka sinergi satuan Tugas Sapu bersih Peungutan Liar
 - Melakukan sosialisasi dan pendampingan.
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
 - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
 - Menyusun laporan ikhtisar.
 - 8) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
 - Menyusun laporan ikhtisar.
- b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan rincian sub kegiatan :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
 - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil potensi kerugian negara.
 - Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil Pengaduan masyarakat
 - Menyusun laporan hasil pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat

II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari kegiatan :

- a) Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
 - Melaksanakan pengumpulan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Kab/Kota
 - Melaksanakan evaluasi terhadap Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Kab/Kota

2) Pendampingan dan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi Birokrasi.

- Menyiapkan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- Melaksanakan Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi.

- Melaksanakan pengumpulan data progres Monitoring Control for Prevention (MCP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Melaksanakan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N Lapor)

4) Pendampingan dan asistensi verifikasi penegakan integritas

- Melaksanakan Pelaporan dan Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- Melaksanakan pengumpulan data dan Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) pada perangkat daerah.

III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yang mencakup :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, Renstra, IKU, Rencana Aksi, Dokumen LKJ, Evaluasi Renja Tw 1, II, III, IV)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
- c. Kegiatan Adm Barang Milik Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penyusunan Dokumen penatausahaan barang milik daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penyusunan dokumen dan buku Inventaris barang milik daerah
- d. Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Melaksanakan/mengikuti kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan dalam atau luar daerah

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Menyusun perkiraan kebutuhan alat listrik setiap bulan
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Menyusun kebutuhan barang
 - Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Menyusun perkiraan kebutuhan peralatan rumah tangga
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Menyusun perkiraan kebutuhan barang cetak dan penggandaan setiap bulan
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- 5) Penyediaan Bahan Material
 - Menyusun perkiraan kebutuhan ATK setiap bulan
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyediaan fasilitas kunjungan tamu kedinasan
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air listrik
 - Menyusun perkiraan kebutuhan air setiap bulan
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
 - Melakukan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
 - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- 2) Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
 - Melakukan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kendaraan dinas
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Melakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju Rakyat Lampung Berjaya.

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA AKSI INSPEKTORAT 2023

RENCANA AKSI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN										
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET /TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET /TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	21							
1	Meningkatnya Kinerja Keuangan berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembinaan dan Pengawasan	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti)	1	10%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	1	20%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti														
			2	40%			2	20%	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	1	-	1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v								
														2	-	2	Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	v	v	v	v			
			3	60%			3	20%				3	-	3	3	Penyusunan dokumen laporan hasil pengawasan kinerja					v			
			4	86%			4	26%				4	6 Laporan											
														Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1	-	1	1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v			
																2	-	2	2	Pelaksanaan	v	v	v	v

													Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung						
							3	-		3	Penyusunan dokumen laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah								v
							4	5 Laporan											
							1	-		1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v							
							2	-		2	Pelaksanaan revid laporan kinerja pada 48 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	v	v	v				v	
							3	-		3	Penyusunan laporan hasil revid laporan kinerja								v
							4	3 Laporan											
							1	-		1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v							
							2	-		2	Pelaksanaan revid laporan keuangan pada 48 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi	v	v	v				v	

1	0	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPIP Perangkat Daerah	1	25%	Keg : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Prosentase Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan								
2	0			2	25%										
3	0				3	25%									
4	3.05				4	25%									
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1		1	Rapat penyusunan tim dan tata cara penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan	√		
								2		2	Koordinasi dengan Itjen Kemendagri	√			
								3		3	Koordinasi dengan Inspektorat di Kabupaten/Kota	√	√	√	√
								4	1 rekomendasi	4	Penyusunan dokumen PKPT Inspektorat Provinsi Lampung				√

								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasailitasi Pengawasan yang Disusun	1		1	Rapat pembentukan tim dan pembuatan SK	√				
										2		2	Koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung	√	√	√	√	
												3	Penyusunan dokumen SPIP					
										4	1 rekomendasi							

								1	20 %	Keg : PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah								
								2	20 %	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1-4	48 PD	1	Rapat pembentukan tim dan pembuatan SK	√			
								3	20 %					2	Pendampingan dan asistensi kepada 48 OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung	√	√	√	√
								4	24 %					3	Penyusunan dokumen EPPD dan SAKIP				√

						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1-4	15 PD	1	Rapat koordinasi dengan 15 OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung		√		
										2	Pendampingan dan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1-4	4 PD	1	Rapat koordinasi dengan OPD mengenai pencegahan korupsi	√	√	√	√
										2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	√	√	√	√
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	1	12 PD	1	Rapat penyusunan tim pelaksana kegiatan dan SPT	√			

									Penegakan Integritas												
										2	12 PD	2	Pendampingan pada 48 OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung	√	√	√	√				
										3	12 PD										
										4	12 PD										
2									Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	25 %	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
										2	25 %	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2 Dok	1	Penyusunan dokumen PK, PK Perubahan, Renstra, Renja, DPA, dan DPA Perubahan	√	√	√	√
										3	25 %			2	1 dok						
										4	25 %			3	1 dok						
														4	2 Dok						
										1	25 %	Keg : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
										2	25 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1	160 orang	1	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi	√	√	√	√

							Lampung				
3	25 %			2	160 orang	2	Pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√
4	25 %			3	160 orang						
				4	160 orang						
		Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	1 Lap	1	Penyusunan laporan keuangan per triwulan	√	√	√	√
				2	1 Lap						
				3	1 Lap						
				4	1 Lap						
1	25 %	Keg : ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah								
2	25 %	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	Penunjukan pejabat penatausahaan BMD	√			
3	25 %			2		2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√
4	25 %			3		3	Penyusunan				

								Laporan Penatausahaan barang Milik Daerah di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung				√
					4	1 Lap						
		Rekomendasi dan penyusunan laporan BMD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	Koordinasi dengan BPKAD mengenai aset yang tercatat dalam daftar Inventaris Barang di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√	
				2		2	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung					
				3								
				4	1 Lap							√
1	16 %	Keg : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase kompetensi pegawai yang ditingkatkan									
2	16 %	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1		1	Pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung		√	√	√	

						3	16 %				2	48 orang	2	Pelatihan kantor sendiri (PKS)		√		√
						4	16 %				3	20 orang						
											4	20 orang						

						1	25%	Keg : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase capaian administrasi umum perangkat daerah									
						2	25%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4 Paket	1	Penyediaan peralatan listrik di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√	
						3	25%			2	4 Paket							
						4	25%			3	4 Paket							
										4	4 Paket							
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1 paket	1	Belanja Modal peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung				√	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4 Paket	2	Penyediaan belanja peralatan	√	√	√	√	

										Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	4 Paket	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Inspektorat Provinsi	√	√	√	√
												2	4 Paket						
												3	4 Paket						
												4	4 Paket						
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4 Lap	1	Pelaksanaan kegiatan rapat di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√
												2	4 Lap						
												3	4 Lap						
												4	4 Lap						
										Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	4 Lap	1	Pelaksanaan kegiatan koordinasi di dalam dan di luar daerah	√	√	√	√
												2	4 Lap						
												3	4 Lap						
												4	4 Lap						
							1	25 %	Keg : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									
							2	25 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	4 Lap	1	Pembayaran biaya langganan listrik PLN	√	√	√	√	
							3	25 %			2	4 Lap							

					4	25 %			3	4 Lap								
									4	4 Lap								
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	4 Lap	1	Pembayaran honorarium PTHL di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√		
									2	4 Lap								
									3	4 Lap								
									4	4 Lap								
					1	25 %	Keg : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah										
					2	25 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	3 unit	1	Pemeliharaan kendaraan operasional, baik R2 dan R4	√	√	√	√		
					3	25 %			2	5 unit	2	Pembayaran pajak kendaraan operasional R2 dan R4		√				
					4	25 %				3	3 unit							
										4	3 unit							
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	20 unit	1	Servis AC, printer dan laptop di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√		
										2	20 unit							

												320 unit				
												426 unit				
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 'Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	34 unit	1	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor inspektorat Provinsi Lampung			√

INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM. MM. CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001